UNIVERSITAS GADJAH MADA
Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Lingkar Utara Lamongan
Taro Debby Mafika Sari, Virga Dwi Effendi, S.H., LL.M. ; Dwi Haryati, S.H. M.H. ; Dr. Hendry Julian Noor, S.H. M.Kn.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

DAFTAR PUSTAKA

ARTIKEL

Asshiddiqie, J. (2012). *Penegakan hukum*. Solusi Hukum. http://www.solusihukum.com/artikel/artikel49.php

FaktualNews.co. (2025). *Jalan Lingkar Utara Lamongan belum dibuka, DPRD kritik kinerja penyelenggara*. Diakses pada 2 Desember 2025, dari https://faktualnews.co/2025/07/15/jalan-lingkar-utara-lamongan-belum-dibuka-dprd-kritik-kinerja-penyelenggara/388855/

Hukumonline. (2023). *Hukum administrasi negara: Pengertian, sumber, dan subjeknya*. Diakses pada 27 Oktober 2025, dari https://www.hukumonline.com/berita/a/hukum-administrasi-negara-lt62de00a9c74d4/

Memontum.com. (2025). *Proses pembebasan sisa lahan JLU atau Ring Road di Lamongan belum ada progres baik*. Diakses pada 2 Desember 2025 https://memontum.com/proses-pembebasan-sisa-lahan-jlu-atau-ring-road-di-lamongan-belum-ada-progres-baik#google_vignette

BUKU

Ali, H Zainudin. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika

Effendi, P. (1989). *Hukum agraria di Indonesia: suatu telaah dari sudut pandang praktisi hukum*. Universitas Indonesia Library; Rajawali.

Husein, S. B., dkk. (2017). *Sejarah Lamongan dari masa ke masa.* Surabaya: Airlangga University Press.

Jamaluddin, H. (2023). *Hukum Administrasi Negara*. CV Eureka Media Aksara.

Karisma, D., & Listyarini, D. (2024). *Hukum administrasi negara*. Yayasan Prima Agus Teknik.

Marzali, A. (2012). *Antropologi dan kebijakan publik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Muchsin dan Fadillah Putra. (2002). Hukum dan Kebijakan publik Analisis atas Praktek Hukum dan Kebijakan Publik dalam Pembangunan Sektor Perekonomian di Indonesia. Avveroes Press. Hlm. 23.

Ridwan, H. R. (2011). *Hukum administrasi negara* (Edisi revisi). Jakarta: Rajawali Pers.

Salindeho, J. (1988). *Masalah tanah dalam pembangunan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat* (Edisi ke-17). Rajawali Pers.

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Lingkar Utara Lamongan
Taro Debby Mafika Sari, Virga Dwi Effendi, S.H., LL.M. ; Dwi Haryati, S.H. M.H. ; Dr. Hendry Julian Noor, S.H. M.Kn.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Soekanto, S. (2016). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Sunarno, S. (2006). *Hukum pemerintahan daerah*: Sinar Grafika.

Supriadi. (2009) *Hukum Agraria*. Jakarta: Sinar Grafika.

Yin, R. K. (2016). *Qualitative research from start to finish* (2nd ed.). The Guilford Press.

JURNAL

Effendi, W. R. (2017). Nasionalisme dan kewarganegaraan. *Jurnal Trias Politika, 1*(2). https://doi.org/10.33373/jtp.v1i2.1065

Firmanda. (2024). *Pekerjaan Timbunan Proyek Jalan Lingkar Utara (JLU) Kabupaten Lamongan. Prosiding Kerja Praktek, 1*(2). Diakses dari https://ejurnal.itats.ac.id/projek/article/view/6019/4370

Hansastri, H., & Hamdani, H. (2024). Sinkronisasi dan sinergitas proyek infrastruktur prioritas dan proyek strategis nasional dengan perencanaan nasional dan daerah. *Menara Ilmu: Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah*, 18(2). https://doi.org/10.31869/mi.v18i2.5577

Nuriyatman, E., Ruswandi, M. R., & Fatimah, S. (2025). *Kendala administratif dan koordinasi dalam implementasi kebijakan kewarganegaraan di Indonesia*. Jurnal Citizenship Virtues, 5(1), 33-46. https://doi.org/10.37640/jcv.v5i1.2272

Soeparyanto, T., & Rekan. (2024). *Dampak pembangunan jalan lingkar di Kota Kendari terhadap nilai jual lahan.* Diakses dari https://www.researchgate.net/publication/383670193_Dampak_Pembangunan_Jalan_Lingkar_di_Kota_Kendari_terhadap_Nilai_Jual_Lahan

Sutawijaya, A. (2004). *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi nilai lahan serta dampaknya terhadap alih fungsi lahan. Jurnal Makara Seri Sosial Humaniora, 8*(1), 30–37.

Wulandari, P., Syamsir, & Kosariza. (2024). Arrangements for archive depreciation to improve regional government performance in perspective legislation in Indonesia. *Mendapo: Journal of Administrative Law, 5*(2), 183–197. https://doi.org/10.22437/MENDAPO.V5I2.31749

SKRIPSI

Mustaqimah, A. (2024). *Dampak pemanfaatan uang ganti kerugian pengadaan tanah Jalan Lingkar Selatan terhadap kesejahteraan pihak yang berhak di Kota Salatiga (Studi di Kelurahan Kecandran, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga)* (Skripsi/Diploma thesis, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional). https://repository.stpn.ac.id/4403/1/ARINI%20MUSTAQIMAH_20293485_1.pdf

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Lingkar Utara Lamongan
Taro Debby Mafika Sari, Virga Dwi Effendi, S.H., LL.M. ; Dwi Haryati, S.H. M.H. ; Dr. Hendry Julian Noor, S.H. M.Kn.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Pesarawan, A. T. (2016). *Pelepasan hak atas tanah untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera di Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran* (Skripsi sarjana, Universitas Lampung). https://digilib.unila.ac.id/24274/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf

Sukma, N. U. (2021). *Penegakan hukum administrasi negara terhadap pengawasan kawasan hutan mangrove di Kabupaten Barru* (Skripsi, Universitas Hasanuddin). Universitas Hasanuddin. https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/5779/2/B12114007_skripsi%201-2.pdf

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Perkotaan Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Sidoarjo, Surabaya, Lamongan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas.

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan Tahun 2020–2039.

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021–2026.

Peraturan Bupati Lamongan Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021–2026.